

Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba

Strategy for the Development of Marumasa Beach Tourism Objects in Bulukumba Regency

Firdha Nur Ananda^{*}, Nining Haslinda Zainal, Juharni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: firdhananda27@gmail.com

Diterima: 10 November 2022 / Disetujui : 30 Januari 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui dukungan apa yang diberikan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata masih kurang efektif karena fasilitas yang diberikan belum ada sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Dukungan yang telah diberikan Pemerintah Dinas dan Pemerintah Daerah masih melakukan komunikasi secara moril dengan masyarakat Desa Darubiah terkait pengembangan kawasan wisata. Pemerintah selalu memberikan motivasi dan saling bersinergitas bersama.

Kata Kunci: Pariwisata, Strategi, Dukungan Pemerintah

Abstract

This study aims to determine the strategies used by the government in developing Marumasa Beach tourism objects in Bulukumba Regency and to find out what support the government has given to Marumasa Beach tourism objects in Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Determination of informants is done by purposive sampling technique. Meanwhile, data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and levers. The results of this study indicate that the development strategy carried out by the government in developing tourism objects is still less effective because the facilities provided do not yet exist so that the facilities and infrastructure provided are not yet available. there is still minimal at Marumasa Beach. The shaman that has been given by the Government Service and Local Government is still communicating morally with the people of Darubiah Village regarding the development of the tourist area. The government always provides mutual motivation and mutual synergy

Keywords: Tourism, Strategy, Government S



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah bisnis jasa yang mengandalkan inovasi. Indonesia yang memiliki banyak potensi dalam bisnis pariwisata harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk

kepentingan masyarakat (Kominfo.go.id, 2015). Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, beraneka keindahan alamnya dan penduduknya yang terdiri dari ratusan suku bangsa, sesungguhnya memiliki potensi wisata alam, sosial dan budaya yang besar. Potensi dan sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Sebagian besar sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi beberapa objek wisata. Mengingat daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan kekayaan seni budayanya, maka tidak heran jika potensi ini menarik untuk dikembangkan (Pendit, 2002).

Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan (pasal 11 UU No. 10 Tahun 2009). Pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, mengembangkan budaya, memperbaiki citra bangsa, dan memperkuat hubungan dengan negara lain (Sutawa, 2012). Menurut (Suwanto, 2004) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dandaya dukungannya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut (Rotua dan Rudi, 2016).

Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan mungkin merupakan salah satu lokasi wisata paling populer di Indonesia bagi wisatawan lokal dan internasional. Perbukitan di kaki Gunung Bawakaraeng Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan lautan lepas merupakan empat wilayah Kabupaten Bulukumba yang terpisah dari segi geografi. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian paling selatan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Bisnis perahu phinisi sudah terkenal di daerah ini, dan menciptakan nilai ekonomi tambahan yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km². Bulukumba memiliki 25 objek wisata yang kaya dengan keindahannya. Salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan yaitu pantai marumasa. Hal ini dikarenakan Pantai Marumasa tak hanya menyuguhkan keindahan pantainya tapi juga terdapat tebing yang eksotis untuk menikmati pemandangan matahari terbit di pantai ini. Pantai Marumasa sendiri terletak di Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun berbagai masalah kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba antara lain: (1) Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata; (2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata; (3) Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur; (4) Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata (ppid.bulukumbakab.go.id, 2020).

Sarana dan prasarana pantai masih kurang karena masyarakat setempat masih mengelola Pantai Marumasa dalam kondisi alamnya. Akibatnya, pantai ini tidak menerima jumlah pengunjung yang signifikan, sehingga tetap mempertahankan aspek alamnya. Terdapat banyak perahu atau sampan yang ditambatkan di sepanjang pantai karena selain sebagai objek wisata, pantai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memarkir

perahu atau sampan yang biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan. Akibatnya, ada beberapa perahu dan kano yang ditambatkan di sepanjang pantai. Karena tidak ada transportasi umum yang akan membawa Anda ke Pantai Marumasa, cara terbaik untuk sampai ke sana adalah dengan mobil, karena pantai tidak dapat diakses dengan cara lain. Status jalan menuju pantai ini buruk karena belum diaspal atau beton sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui. Akibatnya, pengunjung disarankan untuk berkendara perlahan di sepanjang rute ini. Kurangnya dukungan untuk pertumbuhan dan pelestarian di kawasan wisata ini, dan akibatnya, tidak ada fasilitas tambahan yang tersedia untuk mendukung berbagai macam kegiatan pariwisata. (berakhirpekan.com, 11 Mei 2020). Perlunya upaya pengembangan pariwisata objek wisata di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, agar dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat yang berusaha di sektor wisata tersebut. Masih kurangnya sarana dan prasarana objek wisata di Pantai Marumasa, sehingga sarana dan prasarananya belum memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui dukungan apa yang diberikan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri atas reduksi kata, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, maka berikut akan dibahas ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

Obyek dan Daya Tarik Wisata

Ridwan (2012) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Objek dan daya tarik dapat dilihat dari potensi alam yang dimiliki Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba yang bisa dijadikan hiburan bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk melihat bagaimana Objek dan daya tarik yang dimiliki Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut:

“Kecamatan Bonto bahari merupakan kawasan strategis pengembangan pariwisata, ada beberapa kawasan bahari di Kabupaten Bulukumba salah satunya adalah marumasa, marumasa beda dari pantai-pantai lain seperti bira karena keindahannya itu pantai dan tebingnya”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa Kecamatan Bonto Bahari merupakan kawasan strategi pengembangan pariwisata yang memiliki beberapa tempat

wisata di Kabupaten Bulukumba. Salah satu objek wisata yang ada di Bonto Bahari ialah Pantai Marumasa, seperti yang dikatakan Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pembangunan Destinasi Pariwisata ialah yang menjadi daya tarik dari Pantai Marumasa ini adalah keindahan pantai dan tebingnya yang beda dari pantai-pantai lainnya seperti Pantai Bira.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi objek dan daya tarik yang dimiliki dari Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba ini memiliki keindahan pantainya yang berpasir putih yang menjadi beda dari pantai – pantai lain yang berada di Kecamatan Bonto Bahari. Dan juga memiliki dua tebing yang mengapit keindahan Pantai Marumasa berpasir putih, beberapa spot foto yang indah akan pemandangannya. Dimana yang menjadi objek dan daya tarik Menurut Suwanto (2004) mengatakan bahwa daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Hal-hal yang dimiliki oleh daya tarik wisata mencakup suatu unsur yang utama dalam menarik wisatawan untuk datang dan menikmati unsur tersebut.

Prasarana Wisata

Yoeti (2006) yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, terminal dan lain sebagainya menurut Suwanto (2004).

Untuk melihat prasarana yang ada di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengatakan bahwa :

“Kalau kita berbicara infrastruktur yang ada di Pantai Marumasa ini , prasarana – prasarana yang lain memang sebenarnya Dinas Pariwisata belum sampai ke Marumasa untuk pembangunan infrastruktur sehingga prasarannya masih kurang, karena masalah anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas selaku Kepala Bidang Pembangunan Destinasi Pariwisata mengatakan bahwa saat ini prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih kurang, sampai saat ini Dinas Pariwisata belum memfokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Pantai Marumasa.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih kurang. Dinas Pariwisata belum memberikan fasilitas sama sekali di Pantai Marumasa, sehingga ketersediaan seperti pelayanan kesehatan, pos keamanan, serta tempat ibadah belum tersedia. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran yang diberikan untuk membangun infrastruktur di Pantai Marumasa belum ada, sehingga prasarannya masih sangat minim. Beberapa yang hanya tersedia seperti toilet, warung, air bersih. Kondisi jalan masuk di pantainya belum diaspal dan juga ketersediaan untuk menuju kawasan wisata Pantai Marumasa ini belum ada sama sekali, hanya kendaraan pribadi yang dapat menuju kawasan wisata tersebut.

Hal ini juga belum sesuai dengan teori Arikunto dalam Arioanto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkandan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Sehingga prasarana yang berperan menjadi penunjang di Pantai Marumasa masih sangat minim sekali.

Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan ialah hotel, biro perjalanan, balai transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya menurut Suwanto (2004).

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut:

“ Untuk sarana – sarana yang lain memang sebenarnya Dinas Pariwisata belum memberikan di Pantai Marumasa karena kurangnya anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa sarana yang ada saat ini di Pantai Marumasa belum ada sama sekali diberikan dari Dinas Pariwisata. Masih kurangnya sarana yang ada di Pantai Marumasa, sehingga fasilitas yang ada di pantai masih kurang untuk wisatawan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa sarana yang ada di Pantai Marumasa juga masih kurang sehingga yang mengelola hanya masyarakat setempat belum ada campur tangan pemerintah sama sekali. Pemerintah belum memberikan sarana karena kurangnya anggaran sehingga untuk memberikan fasilitas di Pantai Marumasa belum ada sama sekali. Hal ini sesuai dengan teori Nanik Darsini (2014), dalam menyediakan sarana memang harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif. Indikator yang dikemukakan adalah : 1. Lokasi; 2. Infrastruktur; 3. Perabot; dan 4. Peralatan. Sarana yang ada di Pantai Marumasa seperti perabot dan peralatan lain yang berada di tebing sudah ada dan itupun dikelola secara pribadi.

Tata Laksana dan Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi saran dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan di bawah tanah, seperti sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai, sistem komunikasi, sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan, akan meningkatkan daya tarik suatu obyek wisata menurut Suwanto (2004).

Infrastruktur merupakan prasarana umum, mencakupi hal-hal sebagai berikut sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan dan jembatan, pelabuhan, airport, terminal atau stasiun kereta api (Bunaken, Bunaken, & Kota, 2007). Sedangkan definisi lain infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005). Berikut hasil wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan dan masyarakat mengatakan bahwa.

“Belum ada sama sekali yang diberikan, jadinya masyarakat yang mengelola sendiri”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan yang dikatakan Bapak Andi Arwin, ialah belum juga sama sekali diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk diberikan wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah maupun pemerintah daerah belum memberikan fasilitas – fasilitas di Pantai Marumasa sehingga infrastruktur yang ada di Pantai Marumasa

belum ada, seperti akses jalan belum teraspal dan ketersediaan seperti tempat pembuangan sudah ada dan itu dikelola secara pribadi. Pengelolaan masih bersifat alami tanpa ada campur tangan pemerintah, karena masih kurangnya anggaran sehingga fasilitas yang ingin diberikan masih terhambat. Hal ini belum sesuai dengan teori Menurut N. Gregory Mankiw “2003”

Dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik “public capital” yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba Mengenai dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, maka berikut akan dibahas ke dalam beberapa indicator sebagai berikut:

Koordinasi

Menurut Sutarto (2006) koordinasi sebenarnya dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi semuanya berdasarkan keselarasan. Atas dasar itu, koordinasi dapat berasaskan bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Peningkatan koordinasi diperlukan supaya dalam pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Berikut wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si, yang mengatakan bahwa :

“Pengelolaan disana masih ke pelaku – pelaku usaha, jadi mereka yang secara intens melakukan kegiatan promosi dan lain – lain, sejauh ini memberikan dukungan dalam perkembangan sdmnya, kita tetap melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah, apa kendalanya yaitu dianggaran” (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa pengelolaan di Pantai Marumasa masih dilakukan oleh pelaku – pelaku usaha dari masyarakat setempat. Sejauh ini dari Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Daerah sering saling berkomunikasi dan membuat strategi dalam meningkatkan pengembangan objek wisata yang berada di Kecamatan Bonto Bahari salah satunya Pantai Marumasa. Tetapi saat ini masih belum adanya pergerakan dari pemerintah karena masih terkendala dimasalah anggaran, sehingga Pantai Marumasa terbengkalai begitu saja karena masih kurangnya anggaran. Dalam mengembangkan suatu obyek kawasan wisata memang perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat dalam mengembangkan obyek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa saat ini dukungan yang diberikan pemerintah masih dukungan moril. Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling berkomunikasi secara intens. Belum ada dukungan secara materil, karena masih kurangnya anggaran yang dimiliki sehingga prasarana dan sarannya masih kurang. Hal ini sesuai dengan teori Hasibuan (2009) berpendapat bahwa, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Motivasi

Untuk pengembangan pariwisata, peran pemerintah dinas pariwisata untuk

memotivasi sangat diperlukan agar kepariwisataan itu dapat berjalan dan usaha pariwisata terus berjalan dengan lancar. Pemerintah desa dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalannya dengan baik menurut Pitana dan Gayatri (2005). Berikut wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mengatakan bahwa :

“komunikasi dengan pemerintah daerah kita lakukan secara intens, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan wisata di Pantai Marumasa”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Dinas Pariwisata telah memotivasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi kawasan wisata Pantai Marumasa. Di dalam pengembangan obyek wisata memang perlu adanya motivasi dari pemerintah guna mengembangkan obyek wisatanya agar kawasan wisata tersebut semakin berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Dinas Pariwisata telah memotivasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengembangkan destinasi kawasan wisata di Pantai Marumasa guna mengembangkan obyek wisatanya. Pemerintah Daerah selalu berkomunikasi dengan masyarakat setempat secara intens. Maka dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakatnya dalam pengembangan obyek wisatanya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winardi (2000), Motivasi adalah berkenaan selaras gerakan, motif disebutnya hal yang menggerakkan atau mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu.

Fasilitas

Dalam pengembangan obyek wisata peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi segala kebutuhan kepariwisataan sehingga kepariwisataan dapat terwujud. Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh kelompok sadar wisata. Adapun pada praktiknya Dinas Pariwisata mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam penyediaan segala kebutuhan kelompok sadar wisata untuk menjalankan program kegiatannya Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005). Untuk melihat fasilitas yang diberikan pemerintah, maka peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si mengatakan bahwa :

“sejauh ini fasilitas yang diberikan belum ada, karena kenapa, karena masih kurangnya anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Dinas Pariwisata belum memberikan fasilitas – fasilitas di Pantai Marumasa, karena masih kurangnya anggaran sehingga fasilitas di Pantai Marumasa masih terbatas. Dan peneliti juga melakukan wawancara untuk melihat fasilitas yang diberikan pemerintah di Pantai Marumasa.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah belum memberikan fasilitas sama sekali di Pantai Marumasa, sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Hanya ada beberapa waung yang tersedia, toilet umum, air bersih, dan perabot di tebing untuk spot foto. Sehingga juga banyaknya sampah – sampah berserakan di dekat area pantai karena minimnya fasilitas yang diberikan. Hal ini sudah sesuai dengan teori Yoeti (2003) fasilitas wisata adalah semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal untuk

sementara waktu di daerah tempat wisata yang dikunjunginya. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang berperan penting dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Namun ketersediaanya masih kurang, sehingga fasilitas yang ada masih minim dan dikelola secara pribadi oleh masyarakatnya.

Dinamisasi

Dalam mengembangkan kepariwisataan yang baik, perlu adanya peran yang sinergis antara dinas pariwisata, pemerintah desa dan masyarakat agar dapat mencapai suatu pembangunan yang ideal. Dinas pariwisata sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak-pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005). Untuk melihat apakah Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan Masyarakat saling bersinergis, maka peneliti melakukan pembuktian dengan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengatakan bahwa:

“kami telah melakukan komunikasi secara intens dengan pemerintah daerah dan masyarakat berupa dukungan – dukungan dalam pengembangan pariwisatanya”.
(wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dapat dilihat dari pernyataan informan di atas bahwa Pemerintah Dinas, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling bersinergis. Karena sejauh ini hanya dukungan secara moril saja yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling bersinergis bersama dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah memberikan dukungan secara moril dan saling berkomunikasi secara intens dalam perkembangan obyek wisata Pantai Marumasa. Hal ini sesuai dengan teori Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005), dalam mengembangkan kepariwisataan yang baik, perlu adanya peran yang sinergis antara dinas pariwisata, pemerintah desa dan masyarakat agar dapat mencapai suatu pembangunan yang ideal. Dinas pariwisata sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak-pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

D. KESIMPULAN

Terkait metode pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata masih kurang efektif karena fasilitas yang diberikan belum ada sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Potensi yang dimiliki dari Pantai Marumasa ini kaya akan keindahan pantai yang telah diapit oleh dua tebing, namun karena masih kurangnya fasilitas yang diberikan sehingga Pantai Marumasa terbengkalai begitu saja. Dukungan yang telah diberikan Pemerintah Dinas dan Pemerintah Daerah masih melakukan komunikasi secara moril dengan masyarakat Desa Darubiah terkait pengembangan kawasan wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah selalu memberikan motivasi dan saling bersinergitas bersama dalam pengembangan kawasan wisata, namun yang menjadi kendala dalam pengembangannya ialah kurangnya anggaran sehingga fasilitas yang diberikan pemerintah di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba belum ada. Hanya saja beberapa warung saja yang menjual makanan ringan dan toilet umum yang tersedia. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam hal ini dukungan yang diberikan dalam pengembangan Pantai Marumasa masih belum efektif karena Pemerintah belum memberikan dukungan yang lebih kepada masyarakat dalam pengembangan Pantai Marumasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barreto, M. dan K. G. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, 4, 773–96.
- Pearce II, R. R. (2008). *Manajemen Strategis* (10th ed.). Salemba Empat.
- Pendit, N. (2002). *Ilmu pariwisata sebuah pengantar. pradnya paramita*.
- Pitana I Gde, G. P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. C.V Andi Offset.
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, A. (2015). *Manajemen Strategi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rudi, R. dan. (2016). *L Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 79–96.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Strong, C. . (2014). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. ANDI.
- Suwantoro. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. ANDI.
- Wheelen, T. L. dan J. D. H. (2008). *Strategic Management and Business Policy* (11th ed.).